



# **BUPATI OGAN ILIR**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014, Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12)

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**dan**  
**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah Rp. 1.347.268.985.600,00,- bertambah sejumlah Rp. 195.610.103.506,21,- sehingga menjadi Rp. 1.542.879.089.106,21,- dengan rincian sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a. Semula	Rp. 1.347.268.985.600,00,-,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 195.610.103.506,21,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.542.879.089.106,21,-

**2. Belanja**

a. Semula	Rp. 1.218.280.615.446,48,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 235.008.389.666,47,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.453.289.005.112,95,-

**3. Pembiayaan**

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 41.473.775.125,48,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.436.877.781,26,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 62.910.652.906,74,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 170.462.145.279,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (17.961.408.379,00),-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 152.500.736.900,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.(89.590.083.993,26),-

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula                     | Rp. 170.505.159.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)      | <u>Rp. 199.750.700.937,21,-</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah |                                 |

- b. Dana perimbangan
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 887.439.308.000,00-       |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 116.548.065.969,00</u> |
- Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.1.003.987.373.969,00-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 289.324.518.600,00,-          |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (120.688.663.400,00,-)</u> |
- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 168.635.855.200,00,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 99.794.054.000,00,-         |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 130.036.445.453,73,-</u> |
- Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 229.830.499.453,73,-
- b. Retribusi daerah
- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 16.073.000.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 31.527.880.113,00,-</u> |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 47.600.880.113,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 5.000.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00,-</u>      |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 49.638.105.000,00,-        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 38.186.375.370,48,-</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 87.824.480.370,48,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 185.309.505.000,00,-         |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (41.813.991.031,00,-)</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 143.495.513.969,00,-
- b. Dana Alokasi Umum
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 623.839.463.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00,-</u>        |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.623.839.463.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 78.290.340.000,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 158.362.057.000,00,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 236.652.397.000,00,-

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pedapatan Hibah

- 1) Semula Rp. 1.525.000.000,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (25.000.000,00,-)

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 16.125.624.600,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (7.571.545.400,00,-)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 8.554.079.200,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp. 126.057.975.000,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (121.057.975.000,00,-)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

- 1) Semula Rp. 2.695.000.000,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.965.857.000,00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 15.660.857.000,00,-

e. Pendapatan lainnya

- 1) Semula Rp. 142.920.919.000,00,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (5.000.000.000,00,-)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 137.920.919.000,00,-

**Pasal 3**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 832.609.053.726,48,-  
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 116.162.186.929,00,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 948.771.240.655,48,-

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 385.671.561.720,00,-

- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 118.846.000.727,47,-

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 662.229.310.056,48,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 57.076.268.651,00,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 719.305.578.707,48,-

b. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 7.390.972.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.227.973.500,00,-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 14.618.845.500,00,-

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 2.254.077.870,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (978.070.097,00,-)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 1.276.007.773,00,-

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 501.474.800,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 233.372.575,00,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 734.847.375,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 157.733.319.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 54.102.642.300,00,-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 211.835.961.300,00,-

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.500.000.000,00,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 15.003.820.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.369.455.400,00,-

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 16.373.275.400,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 157.827.123.920,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 74.816.499.154,81,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan

Rp. 232.643.623.074,81,-



c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 212.840.617.800,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.660.248.182,66,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 255.500.865.982,66,-

**Pasal 4**

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 41.473.775.125,48,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.436.877.781,26,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 62.910.652.906,74,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 170.462.145.279,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.961.408.379,00,-)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 152.500.736.900,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

1) Semula Rp. 8.533.210.168,42,-

2) Berkurang/(Berkurang) Rp. 27.279.717.027,70,-

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 35.812.927.196,12,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah .

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman .

1) Semula Rp. 0,00,-

- f. Penerimaan piutang daerah.
- |  |     |                             |                     |
|--|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 32.940.564.957,06,-         |                     |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                           | Rp. | <u>(5.842.839.246,44,-)</u> |                     |
| Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan | Rp. |                             | 27.097.725.710,62,- |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan.
- |  |     |               |        |
|--|-----|---------------|--------|
| 1) Semula  | Rp. | 0,00,-        |        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                           | Rp. | <u>0,00,-</u> |        |
| Jumlah Pembentukan dana Cadangan setelah perubahan | Rp. |               | 0,00,- |
- b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.
- |   |     |                         |                  |
|---|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 0,00,-                  |                  |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. | <u>750.000.000,00,-</u> |                  |
| Jumlah Penyertaan Modal Saham setelah perubahan | Rp. |                         | 750.000.000,00,- |
- c. Pembayaran pokok utang.
- |  |     |                              |                      |
|--|-----|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 170.462.145.279,00,-         |                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                         | Rp. | <u>(18.711.408.379,00,-)</u> |                      |
| Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan | Rp. |                              | 151.750.736.900,00,- |
- d. Pemberian pinjaman daerah.
- |  |     |               |        |
|--|-----|---------------|--------|
| 1) Semula  | Rp. | 0,00,-        |        |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                           | Rp. | <u>0,00,-</u> |        |
| Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. |               | 0,00,- |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran IIb Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
5. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 3 Oktober 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (8/OI/2016)

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

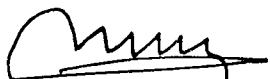
Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Oktober 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**



**HERMAN**